BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

1. INFORMASI UMUM

a. Sejarah pembentukan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram yang beralamat di Jl.Bung Karno No.3 Pagutan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 420-427 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Surat Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Mataram yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Penetapan RSUD Kota Mataram sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

Pembentukan pola pengelolaan keuangan BLUD pada dasarnya karena kesulitan pengelolaan keuangan RSUD sebagai SKPD. Karena *core business* rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, bukan sebagai SKPD yang dominan menjalankan program dan kegiatan yang terencana. Sehingga diperlukan fleksibilitas pola pengelolaan keuangannya,karena pola pengelolaan sebagai SKPD sangat tidak fleksibel dengan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Legal formal PPK SKPD yang berkenaan langsung adalah PP 71 tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual , serta Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram.

RSUD Kota Mataram berkedudukan dan berkantor di Jl. Bung Karno No.3 Pagutan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Bidang Usaha dan Kegiatan Utama

Kegiatan utama BLUD rumah sakit adalah memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkesinambungan / terus menerus, dengan dibutuhkan layanan yang cepat, sehingga harus didukung pola pengelolaan keuangan yang fleksibel.

c. Susunan Organisasi

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Layanan Umum RSUD Kota Mataram pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas :

Ketua Dewan Pengawas	:	dr. H. Usman Hadi
Sekretaris	:	Juli Yuspita, SSt
Anggota	:	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE.,MM
		H. Masbuhin, SIP

Direksi :

Pemimpin BLUD/ Direktur	:	dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,K-FER
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	:	drg. Dianita Rahmi
Wakil Direktur Pelayanan	:	Tris Cahyoso

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

1) Kas dan Setara Kas (lanjutan)

- **Pengertian**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/restribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- **Pengakuan dan Pencatatan.**

Kas dan setara kas diakui dan dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

- **Pengukuran**

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan. Kas dan setara kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- **Penyajian dan Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan kas dan setara kas di Neraca maupun catatan atas laporan keuangan adalah:
Rincian jumlah kas dan setara kas
Klasifikasi kas dan setara kas dan jumlah masing-masing

2) Investasi Jangka Pendek / Investasi Lancar

- **Pengertian**

Investasi jangka pendek adalah bentuk investasi yang dimaksudkan untuk memanfaatkan dana RSUD Kota Mataram dalam jangka pendek dengan jatuh tempo atau pemilikannya dimaksudkan tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal neraca. Investasi jangka pendek ini tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.

- **Pengakuan dan Pencatatan.**

Investasi jangka pendek diakui pada saat di investasikan berdasarkan nilai perolehan investasi jangka pendek.

- **Pengukuran**

Investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada investasi jangka pendek dalam valuta asing,maka harus dikonversi berdasarkan nilai kur tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, investasi jangka pendek dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- **Penurunan Nilai**

Apabila berdasarkan kondisi pasar dan estimasi professional kemungkinan besar akan terjadi penurunan / kenaikan nilai, maka laba atau rugi yang belum terealisasi tersebut diakui sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut direalisasi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

2) Investasi Jangka Pendek / Investasi Lancar (lanjuatan)

- **Penyajian dan Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka pendek di Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
Rincian jumlah investasi
Jenis dan penempatan investasi
Jangka waktu dan
Penilaian investasi dalam laporan.

3) Piutang

- **Pengertian**

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang timbul dari adanya penyerahan jasa atau barang yang pembayarannya tidak bersamaan dengan waktu terjadinya penyerahan tidak bersamaan dengan waktu terjadinya penyerahan jasa/barangdan /atau pembayaran atas penyerahan jasa/barang baru dilakukan setelah beberapa hari atau beberapa beberapa bulan, lazimnya diklasifikasikan sebagai Piutang Usaha. Transaksi lain yang memunculkan piutang bagi RSUD Kota Mataram dapat diklasifikasikan ke dalam Piutang lain-lain seperti pinjaman uang kepada karyawan atau kepada pihak lain.

- **Pengakuan dan Pencatatan.**

Piutang diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat hak klaim untuk mendapatkan arus kas atau manfaat ekonomi lainnya dari penyerahan barang atau jasa telah terpenuhi. Hak klaim atau manfaat ekonomi tersebut dapat diukur dan diestimasi.

- **Pengukuran**

Piutang dinilai sebesar nilai tunai (bersih) yang diperkirakan dapat direalisasikan. Untuk itu piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih hendaknya dibuatkan penyisihanya dalam jumlah yang layak.

Penentuan besarnya nilai penyisihan pada tiap akhir tahun didasarkan pengelompokan piutang menurut umurnya (*aging schedule*) yaitu :

No.	Kelompok Umur	Penyisihan Piutang
1.	1 (satu) s.d 2 (dua) tahun	25%
2.	2 (dua) s.d 3 (tiga) tahun	35%
3.	3 (tiga) s.d 4 (empat) tahun	50%
4.	4 (empat) s.d 5 (lima) tahun	75%
5.	Diatas 5 (lima) tahun	100%

- **Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain :
Klasifikasi piutang menurut umur.
Klasifikasi piutang debitur dan jenisnya

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

4) Persediaan

- **Pengertian**

Persediaan adalah barang untuk dijual atau barang habis pakai dalam satu periode akuntansi. Persediaan terdiri atas : bahan habis pakai kantor, obat-obatan, alat kesehatan, alat listrik, alat kebersihan, bahan makanan kering, bahan dan alat kesehatan laboratorium, bahan dan alat kesehatan radiologi, gas mesik, karcis retribusi dan barang cetakan dan lain-lain.

Persediaan bahan/barang yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara sewakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok Aset Lancar melainkan digolongkan sebagai Asset Lainnya.

- **Pengakuan dan Pencatatan**

Pembelian barang untuk dijual (obat-obatan dan alat kesehatan) dan barang habis pakai diakui/dicatat sebagai biaya pada saat pembelian atau perolehan berdasarkan nilai perolehan (termasuk biaya lainnya yang terjadi untuk membawa barang tersebut ke RSUD Kota Mataram).

Pada akhir periode akuntansi, sesuai hasil *stock opname*, sisa barang yang belum terjual atau terpakai dibukukan sebagai persediaan dan biaya dikoreksi sejumlah nilai persediaan tersebut.

- **Pengukuran**

Persediaan dinilai berdasarkan :
Harga perolehan atau nilai realisasi bersih (harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual) mana yang lebih rendah:
Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Pencatatan yang digunakan terhadap persediaan menggunakan pendekatan *Physical Inventory Method* yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat kedalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai biaya sesuai harga perolehan pada saat barang diterima.

Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dibukukan kembali *(reversing entry)* menjadi biaya.

Dasar penilain terhadap persediaan pada saaat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan menggunakan metode *First In First Out (FIFO /* Masuk Pertama Keluar Pertama). Akan tetapi jika suatu jenis persediaan menurun nilainya dan nilainya tercatatnya tidak dapat dipulihkan secara penuh (misalnya karena kerusakan, keusangan, atau penurunan harga jual), maka persediaan diukur berdasarkan nilai realisasi bersih, serta mengakui kerugian penurunan nilai.

- **Pengungkapan**

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain :
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, atau metode penilaian persediaan.

Jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca.
Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan periode.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

5) Uang muka

- **Pengertian**

Uang muka menurut pembayaran/penurunan nilai asset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang dan jasa, dan uang muka kegiatan tertentu, yang maksud dan penggunanaannya akan dipertanggung jawabkan kemudiaan.

- **Pengakuan dan pencatatan**

Uang muka diakui/dicatat pada saat pembayaran kas.
Uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan.
Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

- **Pengukuran**

Uang muka diukur berdasarkan jumlah uang muka /nilai nominal yang dikeluarkan.

- **Penyajian dan Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan uang muka di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain: rincian uang muka berdasarkan klasifikasi belanja dan jumlah masing-masing klasifikasi serta batas waktu pertanggungjawaban.

B. Aset Tetap

- **Pengertian**

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki, baik dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri, yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan administrasi RSUD Kota Mataram dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun/periode akuntansi.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD/APBN dan dana BLUD RSUD melalui pembelian,pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (*trade-in*).

Aset Tetap terdiri dari :
1) Tanah.
2) Gedung dan Bangunan.
3) Peralatan dan Mesin.
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan.
5) Aset Tetap Lainnya.
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Definisi yang berkaitan dengan aset tetap :
1) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaat.
2) Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.
3) Umur manfaat (*useful life*) adalah :
   Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh RSUD.
   Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh RSUD .

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

B. Aset Tetap (lanjutan)

4) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan pada aset pada saat pertama kali diakui.
5) Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh RSUD saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
6) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliiki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
7) Jumlah tercatat (*carrying amount*) adalah nilai yang disajikan dalam neraca stelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
8) Jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) adalah nilai lebih antara harga jual neto dan nilai pakai suatu aset.
9) Nilai khusus entitas (*entity spesific value*) adalah nilai kini dari arus kas suatu entitas yang diharapkan timbul dari penggunaan aset dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian kewajiban.
10) Kerugian penurunan nilai *(impariment loss*) adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut.

- **Pengakuan dan Pencatatan**

Aset tetap yang akan memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang diakui dan dicatat sebagai asset RSUD Kota Mataram pada saat perolehan apabila dari pembelian, pada saat pekerjaan telah selesai dan siap digunakan apabila membangun sendiri atau dibangun oleh pihak ketiga. Sedangkan asset tetap donasi diakui dan dicatat dalam periode berjalan yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

- **Pengukuran**

Aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya dengan mengkredit akun **"Ekuitas Donasi"**.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran *asset non-moneter* atau kombinasi *asset moneter* dan *non moneter*, diukur berdasarkan nilai wajar dari asset yang diperoleh. Jika nilai wajar tidak dapat diukur, maka nilai perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari asset yang diserahkan.

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, biaya pengurugan, dan lain-lain.

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan IMB, notaris pajak, dan lain-lain. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya yang langsung lainnya.

Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaannya serta biaya lainnya yang terkait dengan pembangunan asset tetap tersebut termasuk beban bunga selama masa konstruksi.

Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian, seperti inventaris dan peralatan kantor, dicatat sebesar nilai perolehannya termasuk bea impor, PPN yang tidak boleh dikreditkan, serta biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa asset kelokasi dan kondisi yang diinginkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan pembelian.

Aset tetap diukur dan disajikan berdasarkan nilai perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengeluaran setelah perolehan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

B. Aset Tetap (lanjutan)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu asset tetap akan dicatat sebagai penambahan nilai perolehan asset tersebut apabila :

a) Memperpanjang masa manfaat
b) Menmabah/meningkatkan kapasitas
c) Meningkatkan mutu produksi/peningkatan standar kerja.

Pengadaan barang habis pakai kedokteran yang relatif kecil meskipun memiliki manfaat lebih dari satu tahun tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayakan apabila :

a) Harga satuan barang tersebut diatas Rp300.000,00
b) Barang tersebut bukan merupakan bagian dari asset lain
c) Barang tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan seperti mesin hitung, pelubang kertas dan inventaris kantor lainnya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu asset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan operasional.

- **Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan adalah alokasi sitematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset selama masa manfaat.

Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu asset atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya.

Masa manfaat adalah :

a) Suatu periode dimana suatu asset diharapkan akan digunakan oleh RSUD Kota Mataram atau
b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset oleh RSUD Kota Mataram.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lainyang diserahkan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau kontruksi.
Nilai residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
Jumlah yang dapat disusutkan suatu aset tetap harus dialokasikan secara sepanjang masa manfaatnya dengan metode yang sistematis.
Metode penyusutan yang digunakan oleh RSUD Kota Mataram adalah metode garis lurus (*straight-line method*).

Tarif penyusutan asset tetap :

Kelompok Aset	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
a. Bukan Bangunan		
Kelompok I	4 Tahun	25%
Kelompok II	8 Tahun	12,50%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%
b. Bangunan		
Permanen	50 Tahun	2%
Tidak Permanen	10 Tahun	10%

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

B. Aset Tetap (lanjutan)

Keterangan tabel :

Bukan bangunan Kelompok I

a) Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan;
b) Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, computer dan sejenisnya;
c) Perlengkapan lainnya seperti *amplifier, tape/cassatte, video recorder* dan sejenisnya;
d) Sepada motor, sepeda becak;
e) Alat perlengkapan khusus bagi industri/jasa yang bersangkutan;
f) Alat pertukangan, suku cadang;
g) Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, facsimile, telepon dan sejenisnya.

Bukan banguan Kelompok II

a) Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan;
b) Mobil, bus, truk, *speed boat* dan sejenisnya;
c) Tempat penyimpanan barang dan sejenisnya.

Bukan Bangunan Kelompok III

Adalah semua jenis peralatan dan perlengkapan kantor dan medis yuang bukan termasuk Bangunan, bukan Bangunan kelompok I dan bukan Bangunan Kelompok II.

C. Aset Lainnya

- **Pengertian**

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan asset tetap.

Aset lainnya terdiri dari :

a) Aset Tak Berwujud.
Aset tak berwujud adalah hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan RSUD Kota Mataram dalam menghasilkan pendapatan atau meningkatkan mutu pelayanan. Harga perolehan asset tidak berwujud meliputi biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh asset tersebut.Aset tidak berwujud disajikan dalam laporan keuangan sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasinya . Aset tak berwujud antara lain :

1) Perangkat Lunak Komputer *(software)*.
2) *Lisensi dan francise*. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
4) Hak cipta *(copyright)* , paten, dan kekayaan intelektual lainnya.

Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada penemu *(inventor)* atas hasil temuan *(invention)* di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuaannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

b. Aset Kemitraan dengan Pihak Lain
Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa Kerja Sama Operasi (KSO), Sewa Guna Usaha, dan Kerja sama kemitraan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku pada RSUD Kota Mataram.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

C. Aset Lainnya (lainnya)

c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif (ATDPA)
ATDPA terdiri dari Aset Non Produktif yang berupa aset tetap kendaraan, mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya termasuk pula persediaan bahan/barang instalasi yang rusak atau tidak dapat digunakan karena sebab yang normal.

- **Pengakuan dan Pencatatan**

Aset tidak berwujud diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau adanya penetapan hak Aset tetap yang dibangun/dibuat sendiri maupun dilaksanakan oleh pihak ketiga diklasfikasikan sebagai aset lainnya apabila pada saat penyusunan laporan keuangan aset tersebut masih dalam pengerjaan.

Kemitraan kerjasama diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi yaitu ketika ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama yang diikuti pelaksanaan kegiatan.

Aset tetap berupa mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi karena rusak dan aset yang eksistensi fisiknya masih belum jelas diklasifikasikan kedalam aset lainnya dan dicatat pada saat terjadinya kondisi tersebut.

- **Pengukuran**

Aset tidak berwujud dinilai berdasarkan harga perolehan meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh aset tersebut. Amortisasi aset tidak berwujud harus dilakukan secara sistematis selama masa manfaatnya.

Aset yang dibangun sendiri, apabila pada saat penyusunan laporan keuangan masih dalam pengerjaan, disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai perolehan bahan-bahan nilai biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pembuatan aset tersebut termasuk beban bunga selama masa konstruksi.

Aset yang diperoleh dari Kemitraan dengan pihak ketiga (BKS) dinilai berdasarkan nilai wajar dari aset yang diserahkan oleh investor serta mengkredit akun penghasilan KSO atau penghasilan tangguhan, sedangkan untuk BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu nilai aset yang diserahkan RSUD Kota Mataram ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga/investor.

Aset lain-lain/Aset tetap berupa mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produktif) karena rusak dan aset yang eksistensi fisiknya masih belum jelas dinilai berdasarkan nilai bukunya atau estimasi nilai wajar apabila tidak terdapat nilai bukunya.

Aset lain-lain ini dapat diajukan oleh Direktur RSUD Kota Mataram kepada Walikota untuk dilakukan penghapusbukuan. Setelah ada persetujuan dari Walikota, kerugian penghapusan dibebankan sebagai biaya non operasional sebesar nilai buku tersebut. Apabila barang tersebut masih dapat dijual, maka hasil penjualannya masuk ke rekening pendapatan non operasional lainnya. Terhadap barang yang hilang dan telah disetujui oleh Walikota untuk dihapuskan dibebankan sebagai kerugian di dalam pos biaya non operasional sebesar nilai bukunya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

PEDOMAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

- **Pengertian**

Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar pada waktu tertentu. Kewajiban merupakan tugas dan tanggungjawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekwensi dari kontrak mengikat atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kewajiban juga timbul dari pihak bisnis yang lazim, kebiasaan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil.

Kewajiban di klasifikasikan sebagai :
- Kewajiban jangka pendek; dan
- Kewajiban jangka panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek, jika:
- Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi rumah sakit; atau
- Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca

Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang/usaha dan biaya pegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam satu periode akuntansi, diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek lainnya antara lain bagian dari kewajiban berbunga *(interest-bearing liabilities)* yang akan jatuh tempo dalam periode berjalan, cerukan/bank *overdraft,* utang deviden, pajak penghasilan dan utang selain utang dagang.

Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila :
- kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan;
- RSUD Kota Mataram bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang; dan
- Pendanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada angka 2) , didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Utang usaha adalah kewajiban membayar kepada pihak ketiga atas pembelian barang/jasa yang telah diterima barang/jasanya.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul;
Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam tanggal pelaporan sebesar bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelang tanggal pelaporan.

kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban *(obligation)* sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

- **Pengukuran**

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali;

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

PEDOMAN AKUNTANSI KEWAJIBAN (lanjutan)

Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca.

- **Pengungkapan**

Informasi mengenai kewajiban yang harus diungkapkan terutama dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain :

1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber kewajiban atau pemberi pinjaman;
2) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
3) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
4) Utang-utang dalam penyelesaian hukum; dan
5) Informasi lain yang dipandang perlu

PEDOMAN AKUNTANSI EKUITAS

- **Pengertian**

Ekuitas adalah hak residual RSUD Kota Mataram atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki, atau dengan kata lain ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

Ekuitas RSUD Kota Mataram dapat diklasifikasikan:

1) Ekuitas Tidak Terikat
   Merupakan ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk Ekuitas Tidak Terikat dapat meliputi:
   - Ekuitas Awal
     Merupakan hak residual awal RSUD Kota Mataram yaitu selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali RSUD Kota Mataram ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.
   - Surplus dan Defisit Tahun Lalu
     Merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode-periode sebelumnya.
   - Surplus dan Defisit tahun Berjalan
     Merupakan selisih antara seluruh pendapatan dengan seluruh biaya pada tahun berjalan.
2) Ekuitas Donasi
   Merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.
3) Ekuitas Terikat Temporer
   Merupakan sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh donatur.
4) Ekuitas Terikat Permanen
   Merupakan ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi oleh donatur secara permanen untuk tujuan tertentu. Ekuitas Terikat Permanen meliputi:
   - Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;
   - Aset yang digunkan untuk investasi yang mendatangkan penghasilan secara permanen;
   - Donasi dari Pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

- **Pengakuan**

1) Ekuitas Tidak Terikat diakui dan dicatat pada saat;
   - Ditetapkannya nilai kekayaan RSUD Kota Mataram;
   - Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
   - Diterimanya aset tetap sebagai bantuan/sumbangan;
   - Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

2) Ekuitas Terikat Temporer diakui dan dicatat:
   - Ditetapkan nilai kekayaan RSUD Kota Mataram (jika ada sumber daya yang dibatasi penggunaannya secara temporer);
   - Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang memikat secara temporer;
   - Diterimanya aset tetap sebagai bantuan/sumbangan yang memikat secara temporer.

3) Ekuitas Terikat Permanen diakui dan dicatat pada saat:
   - ditetapkannya nilai kekayaan RSUD Kota Mataram (jika ada sumber daya yang dibatasi penggunaannya secara permanen);
   - diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen;
   - digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

- **Pengukuran**

Ekuitas dinilai berdasarkan;
1) Nilai buku ekuitas pada saat penetapan RSUD Kota Mataram
2) Nominal dana sumbangan/bantuan yang diterima;
3) Dinilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan /bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal;
4) Dinilai buku aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer/permanen menjadi ekuitas tidak terikat.

- **Pengungkapan**

Pengungkapan ekuitas dalam laporan keuangan antara lain klasifikasi ekuitas, rincian ekuitas, jenis dan informasi mengenai sifat ekuitas.

- **Pengertian**

pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas nomal RSUD Kota Mataram selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan RSUD Kota Mataram dapat diklasifikasikan:

1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
   Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Untuk pendapatan ini selanjutnya dirinci perjenis pelayanan yang diperoleh dari RSUD Kota Mataram.
2) Hibah
   Merupakan pendapatn yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi RSUD Kota Mataram untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah sedangkan hibah tidak terikat peruntukannya diserahkan pada Pengelola RSUD Kota Mataram.
3) Hasil kerjasama dengan pihak lain.
   Merupakan pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang bukan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kota Mataram .
4) APBN/APBD
   Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN/APBD baik untuk keperluan operasional maupun keperluan investasi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

- **Pengertian** (lanjutan)

5) Lain-lain Pendapatan RSUD Kota Mataram yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, hasil pemanfaatan kekayaan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Kota Mataram dan hasil investasi.

Pendapatan adalah semua penerimaan kas dan hak tagih yang timbul dari penyerahan barang/jasa kepada pihak lian/masyarakat dalam periode tertentu yang menjadi hak RSUD Kota Mataram .

Asas bruto adalah suatu prinsip bahwa penerimaan disetor ke Kas secara bruto, tidak boleh dikompensasi dengan pengeluaran. Hal ini dikecualikan pada penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan, dicatat setelah dipotong atau ditambah dengan penyesuaian tarif kontraktual.

- **Pengakuan dan Pencatatan**

Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada sat diterima kas atau hak untuk menagih timbul atau pada saat selesainya penyerahan barang/jasa kepada pihak lain/masyarakat.

Pendapatan Jasa Layanan dari Jamkesmas diakui setelah terbitnya Berita Acara Verifkasi dari Verifikator Independen;

Pendapatan dari APBN/APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah;
Pengakuan pendapatan lainnya pada prinsipnya sama dengan pendapatan usaha.

- **Pengukuran**

Pendapatan dari usaha jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima;
dari APBN/APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja SPM;
Pendapatan hibah berupa barang, dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan/hak telah berpindah dari pemberi hibah ke RSUD Kota Mataram, sedangkan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.

- **Pengungkapan**

1) Pendapatan disajikan dan dirinci per jenis pendapatan;
2) Rincian jenis pendapatan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
3) Informasi lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan pendapatan.

PEDOMAN AKUNTANSI BIAYA

- **Pengertian**

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Biaya RSUD Kota Mataram diklasifikasikan sebagai berikut :

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

PEDOMAN AKUNTANSI BIAYA (lanjutan)

1) Biaya Operasional,
merupakan seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Kota Mataram dalam menjalankan tugas dan fungsinya,terdiri atas :
   - Biaya Pelayanan
     Mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yaitu biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan ,biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa dan biaya pelayanan lain-lain;
   - Biaya Umum dan Administrasi
     Mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa biaya promosi , dan biaya umum dan administrasi lain-lain;

2) Biaya Non Operasional
Merupakan biaya yang menjadi beban RSUD Kota Mataram dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi seperti biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugian penjualan aset tetap, biaya kerugian penurunan nilai, dan biaya non operasional lain-lain.

- **Pengakuan**

Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset yaitu pengeluaran kas atau penurunan aset lainnya atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

- **Pengukuran**

Biaya dicatat/dinilai:
1) jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
2) jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
3) alokasi sistimatis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan;
4) jumlah kerugian atas transaksi ekonomi yang terjadi.

- **Pengungkapan**

1) Untuk setiap kelompok/jenis biaya disajikan secara terpisah dalam Laporan Keuangan;
2) rincian jenis biaya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
3) informasi lain yang penting berkaitan dengan pos biaya.

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3. Kas dan Setara Kas

	2023 Rp	2022 Rp
Kas		
· Kas RSUD di Bendahara Pengeluaran BLUD	-	-
	-	-
Bank		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	10.243.701.672,12	-
PT Bank Negara Indonesia Tbk	3.074.983.404,00	7.897.261.859,00
PT Bank Nusa Tenggara Barat	1.175.574.189,00	146.702.772,00
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	974.663.287,00	459.068.490,30
PT CIMB Syariah	676.530.099,49	290.129.424,00
PT Bank Mandiri Tbk (KCP Ampenan)	618.018.161,50	269.244.639,00
PT Bank Mandiri (AA Gde Ngurah)	426.967.177,60	205.325.465,48
	17.190.437.990,71	9.267.732.649,78
Jumlah	**17.190.437.990,71**	**9.267.732.649,78**

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022,kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas utang.

4. Piutang Pelayanan

	2023 Rp	2022 Rp
Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	18.197.566.500,00	41.573.192.886,00
Dinas Kesehatan Kota	3.507.179.799,00	6.448.527.113,00
Pasien Umum	4.559.573.167,25	4.352.465.709,00
Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara	75.262.000,00	23.400.000,00
Rumah Sakit Narmada	55.434.500,00	12.239.000,00
Rumah Sakit Selong	47.400.000,00	-
Rumah Sakit Umum Provinsi	44.980.000,00	-
Rumah Sakit Tresna	10.050.000,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Asyifa	1.989.200,00	1.989.200,00
Piutang lainya (covid 19)	13.732.974.411,00	1.549.470.106,00
	40.232.409.577,25	53.961.284.014,00
Akumulasi penyisihan kerugian piutang pelayanan	(14.396.975.519,50)	(20.251.059.714,00)
Jumlah	**25.835.434.057,75**	**33.710.224.300,00**

Mutasi akumulasi penyisihan piutang :	2023 Rp	2022 Rp
Saldo awal	20.251.059.714,00	20.991.548.670,19
Penambahan (Pencadangan)	25.918.027.257,75	25.224.308.751,35
Pengurangan (Pemulihan)	(31.772.111.452,00)	(25.964.797.708,00)
Saldo akhir	**14.396.975.519,75**	**20.251.059.713,54**

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp14.396.975.519,75 dan Rp20.251.059.713,54 mengalami penurunan dikarenakan terdapat penyisihan piutang tahun 2022 yang sudah dibayarkan senilai Rp. 20.251.059.714.

Berdasarkan penelaahan dari status masing-masing piutang pelayanan pada setiap tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari piutang yang tidak tertagih.

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

5. Piutang Lainnya

	2023 Rp	2022 Rp
Rangga Taxi	25.000.000,00	25.000.000,00
D Parking (PT Mitra Langgeng Sejati)	53.593.200,00	31.000.000,00
Parkir Nustra Salindo	4.000.000,00	4.000.000,00
Sewa Apotik	-	12.500.000,00
Lain-lain	-	17.000.000,00
Jumlah	**82.593.200,00**	**89.500.000,00**

6. Persediaan

	2023 Rp	2022 Rp
Persedian barang farmasi	13.801.958.379,00	22.764.095.009,00
Persedian barang gizi	27.137.954,00	18.671.764,00
Persediaan instalasi pemulasaran jenazah	12.280.000,00	12.280.000,00
Persedian barang rumah tangga	3.900.000,00	4.360.000,00
Persediaan lainnya	98.540.463,00	101.060.406,00
Jumlah	**13.943.816.796,00**	**22.900.467.179,00**

Saldo persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.943.816.796,00 dan Rp22.900.467.179,00

Berdasarkan hasil penalaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen belum melakukan penyisihan persediaan usang.

7. Aset Tetap

	2023			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan (Reklas) Rp	Saldo akhir Rp
Nilai Perolehan				
Tanah	23.841.232.808,00			23.841.232.808,00
Gedung dan bangunan	185.809.040.448,00	4.655.529.257,00		190.464.569.705,00
Peralatan dan mesin	427.515.798.481,00	73.540.088.992,00	125.277.117,00	500.930.610.356,00
Jalan, irigasi dan jaringan	12.907.725.601,00	-	-	12.907.725.601,00
Aset Tetap Lainnya	242.000.000,00	-	-	242.000.000,00
Kontruksi dalam pengerjaan	12.831.179.100,00	-	-	12.831.179.100,00
	663.146.976.438,00	78.195.618.249,00	125.277.117,00	741.217.317.570,00
Akumulasi Penyusutan				
Gedung dan bangunan	18.480.590.795,00	1.475.921.089,00	-	19.956.511.884,00
Peralatan dan mesin	294.142.974.824,00	40.734.257.911,21	-	334.877.232.735,21
Jalan, irigasi dan jaringan	2.010.963.443,00	403.734.292,00	-	2.414.697.735,00
Aset Tetap Lainnya	242.000.000,00	-	-	242.000.000,00
	314.876.529.062,00	42.613.913.292,21	-	357.490.442.354,21
Nilai buku bersih	**348.270.447.376,00**			**383.726.875.215,79**

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

7. Aset Tetap

	2022			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Nilai Perolehan				
Tanah	23.841.232.808,00	-	-	23.841.232.808,00
Gedung dan bangunan	181.445.684.607,00	4.363.355.841,00	-	185.809.040.448,00
Peralatan dan mesin	420.979.600.799,00	6.744.698.682,00	208.501.000,00	427.515.798.481,00
Jalan, irigasi dan jaringan	12.670.099.601,00	237.626.000,00	-	12.907.725.601,00
Aset Tetap Lainnya	242.000.000,00	-	-	242.000.000,00
Kontruksi dalam pengerjaan	12.831.179.100,00	-	-	12.831.179.100,00
	652.009.796.915,00	11.345.680.523,00	208.501.000,00	663.146.976.438,00
Akumulasi Penyusutan				
Gedung dan bangunan	15.553.662.393,00	2.926.928.402,00	-	18.480.590.795,00
Peralatan dan mesin	252.598.738.077,00	41.544.236.747,00	-	294.142.974.824,00
Jalan, irigasi dan jaringan	1.616.520.334,00	394.443.109,00	-	2.010.963.443,00
Aset Tetap Lainnya	242.000.000,00	-	-	242.000.000,00
	270.010.920.804,00	44.865.608.258,00	-	314.876.529.062,00
Nilai buku bersih	**381.998.876.111,00**			**348.270.447.376,00**

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp741.217.317.570 dan Rp663.146.976.438, terjadi kenaikan dikarenakan terdapat penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp73.540.088.992 yang terdiri dari Rp7.860.395.585 yang berasal dari dana BLUD dan Rp65.679.692.407 berasal dari APBD.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap.

8. Aset Tak Berwujud

	2023 Rp	2022 Rp
Sofware SIMRS	2.229.586.200,00	2.229.586.200,00
Sistem Bridging SIM RS & BPJS	199.910.000,00	199.910.000,00
Software Billing System	199.812.800,00	199.812.800,00
Software Rekam Medis	199.903.000,00	199.903.000,00
Aplikasi Daloket	124.000.000,00	124.000.000,00
Software RSUD Kota Mataram	74.480.000,00	74.480.000,00
Website RSUD Kota Mataram	57.000.000,00	57.000.000,00
Set up server web database	53.350.000,00	53.350.000,00
Software Remunerasi	50.000.000,00	50.000.000,00
Aplikasi Android PSC 119	38.000.000,00	38.000.000,00
User License aplikasi server	19.250.000,00	19.250.000,00
Akumulasi Amortisasi	(2.845.493.134,00)	(2.382.305.894,00)
Jumlah	**399.798.866,00**	**862.986.106,00**

9. Aset Lain-Lain

	2023 Rp	2022 Rp
Aset yang tidak digunakan	23.329.094.575,00	23.329.094.575,00
Jumlah	**23.329.094.575,00**	**23.329.094.575,00**

Aset lain-lain berupa mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produktif karena rusak dan aset yang eksistensi fisiknya masih belum jelas dinilai berdasarkan nilai bukunya atau estimasi nilai wajar apabila tidak terdapat nilai bukunya.

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

10. Hutang Usaha

	2023 Rp	2022 Rp
Hutang Obat	8.075.260.373,00	13.342.359.147,00
Hutang BHP Medis	624.460.763,00	7.504.844.935,00
Hutang Jasa Pelayanan	7.383.555.879,00	5.635.371.742,00
Hutang Palang Merah Indonesia	1.170.650.000,00	-
Jumlah	**17.253.947.015,00**	**26.482.575.824,00**

11. Hutang Lain-Lain

	2023 Rp	2022 Rp
Bagian umum	13.618.829.995,00	10.161.769.943,00
Gas medis	2.631.790.768,00	4.254.354.766,00
Bagian penunjang medik	11.029.795.520,00	2.172.078.165,00
Belanja pegawai	1.170.967.757,00	1.082.194.737,00
Hutang RSUP	334.549.697,00	747.091.748,00
Bidang gizi	528.575.549,44	524.924.071,00
Listrik, Telepon dan Air	308.099.335,00	263.618.846,00
Bagian humas	121.384.000,00	40.290.000,00
Bagian pelayanan medis	40.981.200,00	28.791.000,00
Hutang Aplikasi SmartPSC	22.836.457,00	12.987.000,00
Hutang IKJK	25.200.000,00	-
Hutang Kepegawaian	4.762.000,00	-
Hutang lainnya	-	23.625.000,00
Jumlah	**29.837.772.278,44**	**19.311.725.276,00**

12. Pendapatan Diterima Dimuka

	2023 Rp	2022 Rp
Sewa ATM	66.666.666,00	106.666.667,00
Jumlah	**66.666.666,00**	**106.666.667,00**

13. Ekuitas

	2023 Rp	2022 Rp
Ekuitas Awal	27.325.633.040,00	27.325.633.040,00
Surplus (Defisit) Tahun Lalu	359.810.664.141,00	400.393.601.890,00
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	4.569.120.609,03	(60.833.997.463,22)
Ekuitas donasi	25.644.246.951,78	25.644.246.952,00
Jumlah	**417.349.664.741,81**	**392.529.484.418,78**

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

14. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

	2023 Rp	2022 Rp
Jasa jaminan	197.454.270.406,00	151.264.852.633,00
Pasien Umum	17.721.597.542,69	15.349.529.828,96
Pasien Kerjasama/Layanan/Tidak Mampu	521.773.252,00	11.614.711.839,00
Jumlah	**215.697.641.200,69**	**178.229.094.300,96**

15. Pendapatan dari APBD

	2023 Rp	2022 Rp
UP/GU/TU	88.211.849.500,00	23.871.429.443,00
LS	15.798.521.806,00	20.281.418.519,00
Hibah Barang	-	-
Jumlah	**104.010.371.306,00**	**44.152.847.962,00**

16. Pendapatan Lainnya

	2023 Rp	2022 Rp
Pendapatan lain-lain	1.608.710.859,63	1.050.257.016,37
Jumlah	**1.608.710.859,63**	**1.050.257.016,37**

17. Beban Operasional

	2023 Rp	2022 Rp
Beban Jasa Pelayanan	81.061.235.048,00	65.006.037.195,00
Beban Persediaan	86.209.979.671,44	64.482.124.184,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	43.077.100.532,21	45.433.578.830,86
Beban Langganan Daya dan Jasa	28.248.227.359,14	43.514.238.486,05
Beban Pegawai	37.963.215.354,00	34.153.205.438,00
Beban Pemeliharaan	25.790.869.273,00	6.030.289.628,00
Beban Perjalanan Dinas	-	422.414.229,00
Beban Penyisihan Piutang	14.396.975.519,50	25.224.308.751,69
Jumlah	**316.747.602.757,29**	**284.266.196.742,60**

Beban Jasa pelayanan dan persediaan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya peningkatan pendapatan usaha dari jasa layanan.

Beban pegawai mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya penambahan honor pegawai, pejabat teknis, peningkatan jumlah diklat dan pembayaran BPJS pegawai honorer dan kontrak.

18. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang disusun dan di otorisasi pada tanggal 28 Maret 2024.

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp335.012.504.603,07 atau 186% dari anggaran sebesar Rp301.127.220.985,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp253.176.516.770,25 yang terdiri dari :

No.	Keterangan	2023		%	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi			Rp	%
a. Pendapatan Jasa Layanan							
1.	Pasien JKN/BPJS/Kerjasama	165.157.000.000,00	208.246.575.188,00	126,09%	187.995.962.319,00	20.250.612.869,00	10,77%
2.	Pasien Umum	10.500.000.000,00	17.514.490.084,44	166,80%	15.349.529.828,21	2.164.960.256,23	14,10%
3.	Pasien Tidak mampu	3.600.000.000,00	3.665.450.365,00	101,82%	4.852.512.820,00	(1.187.062.455,00)	-24%
b. Pendapatan Sewa							
1.	Pendapatan Sewa	-	-	-	-	-	-
c. Pendapatan APBD							
1.	Pendapatan APBD	111.859.488.335,00	104.010.371.306,00	92,98%	44.152.847.962,00	59.857.523.344,00	135,57%
d. Pendapatan lain-lain							
1.	Pendapatan lainnya	10.010.732.650,00	1.575.617.659,63	16%	825.663.841,04	749.953.818,59	90,83%
TOTAL		**301.127.220.985,00**	**335.012.504.603,07**	**111,25%**	**253.176.516.770,25**	**81.835.987.832,82**	**32,32%**

Realisasi Pendapatan pasien JKN/BPJS/Kerjasama pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.208.246.575.188,00 atau sebesar 126,09% dari anggaran sebesar Rp165.157.000.000,00 realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp20.250.612.869,00 atau 10,77% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp187.995.962.319,00. Begitu juga dengan pendapatan pasien umum realisasi Tahun 2023 sebesar R17.514.490.084,44 sedangkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp15.349.529.828,21 mengalami kenaikan sebesar Rp2.164.960.256,23 atau 14,10%. Kenaikan realisasi pendapatan tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan jumlah pasien di rumah sakit Kota Mataram.

4.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp248.894.181.013,14 atau 118,37% dari anggaran sebesar Rp210.265.115.004,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp237.669.810.423,05 dengan rincian:

No.	Keterangan	2023		%	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi			Rp	%
1.	Pegawai	44.440.557.839,00	37.963.215.354,00	85,42%	33.071.010.701,00	4.892.204.653,00	14,79%
2.	Barang dan Jasa	165.824.557.205,00	210.930.965.659,14	127,20%	204.598.799.722,05	6.332.165.937,09	3,09%
TOTAL		**210.265.115.044,00**	**248.894.181.013,14**	**118,37%**	**237.669.810.423,05**	**11.224.370.590,09**	**4,72%**

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp37.963.215.354,00 atau 85,42% dari anggaran sebesar Rp44.440.557.205,00. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp4.892.204.653,00 atau 14,79% dari realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.071.010.701,00.

Kenaikan ini diantaranya disebabkan karena kenaikan belaja pegawai sebagai berikut:

1) Tambahan PPPK di Tahun 2023
2) Kenaikan gaji dari CPNS ke PNS di Tahun 2023
3) Pembayaran gaji dari kontrak yang dibebankan ke APBD
4) Kenaikan pangkat PNS tiap tahun
5) Tambahan Honor PPTK dan Honor pembimbing Diklat
6) Pembayaran BPJS Kesehatan Pegawai

Realisasi Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp210.930.965.659,14 atau 127,20% dari anggaran sebesar Rp165.824.557.205,00. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp6.332.165.937,09 atau 3,09% dari realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp204.598.799.722,05.
Kenaikan belanja barang dan jasa dikarenakan penambahan pasien, sehingga pendapatan bertambah yang berakibat penambahan bahan habis pakai dan jasa pelayanan.